

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Anggara, Sahya. 2016. *Hukum Administrasi Perpajakan*. Pusaka Setia Bandung. Bandung.
- Brotodihardjo, Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Fahmi, Irham. 2014. *Analisa Kerja Keuangan*. Alfabeta. Bandung.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Fajar. Yogyakarta.
- Handoko, Hani, T. 2009. *Manajemen Edisi 2*, BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hanityo Sumitro, Ronny. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Rakhmawati, Tri. 2017. *Pengukuran Efisiensi di Instansi Pemerintah dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) untuk Mendukung Reformasi Birokrasi*. LIPI Press. Jakarta.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Siagian, Sondang, P. 2006. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Refika Aditama. Bandung.
- Sri Pudyatmoko, Y. 2009. *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak Edisi Revisi*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Wiradipradja, Saefullah. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Keni Media. Bandung.
- Zuraida, Ida, dan dan L.Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

- tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.01/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1704)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1468)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kungjungan (*Visit*) kepada Wajib Pajak

Artikel Jurnal

- Adrianto D. Nugroho. Kedudukan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak dalam Hukum Acara Perpajakan di Indonesia. *Mimbar Hukum Edisi Khusus*. November 2011.
- Amilin. Peran Konseling, Pengawasan, dan Pemeriksaan oleh Petugas Pajak dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Penerimaan Negara. *Jurnal Akuntansi*. Vol.XX. No.2. Mei 2016.
- Arief B. Wardana. Nudges Pada SP2DK sebagai Bagian dari Upaya Peningkatan *Tax Compliance* di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*. Vol.2. No.1. 2018.
- Asmorowati, Meiti. Sengketa Keberatan dibandingkan dengan Sengketa Pengadilan Pajak Berdasarkan Peraturan yang Berlaku. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol.25. No.02. September 2011.
- Atosoki Antonius. *Time Management*: Menggunakan Waktu secara Efektif dan Efisien. *Jurnal HUMANIORA*. Vol.5. No.2. Oktober 2014
- Babici, Georgia, et. All. Tax Administration Strength and Tax Efficiency in Emerging Europe: Lessons for Romania. *International Economic Journal*. Vol. 33. No. 4. November 2019.
- Fergie. V. Parmono. Analisis Efektivitas Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.4. No.1. Maret 2016.
- Isipriyarso, Budi. Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol.2. No.1. Maret 2019.
- Muzaki, Isep, et. all. Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*. Vol.9. No.1. Januari 2020.
- Purnama Sari, Devi. Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Proses Penyelesaian Keberatan Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*. Vol. 3. No. 1. Maret 2016.
- Putra, Handayani, Azizah. Evaluasi Atas Penyelesaian Keberatan dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa di Bidang Perpajakan (Studi Kasus pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III). *Jurnal Universitas Brawijaya*. Vol.2. No.1. 2014.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Citra Ernie Larasati. 2020. Penyusunan SPT (Surat Pemberitahuan) Pembetulan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak 2018 Pada CV X Sebagai Upaya Menindaklanjuti SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan). Tugas Akhir. D3 Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Melanie Anggraini Andriyaningrum. 2015. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepuasan Kerja Fiskus. Skripsi, S1 Fakultas Ekonomi. Universitas Widyatama. Bandung.

Artikel Internet

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). Efisiensi. <https://kbbi.web.id/efisiensi>. Diakses 27 September 2020.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pendapatan Negara Didominasi Perpajakan. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24532/t/>. Diakses tanggal 21 Januari 2020.
- Inspektorat Daerah. Jenis-Jenis Pengawasan. <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>. Diakses pada 6 Mei 2021.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. APBN 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>. Diakses 1 April 2021.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Laporan Tahunan 2018. <https://pajak.go.id/sites/default/files/201911/Laporan%20Tahunan%20DJP%202018%20-20bahasa%20Indonesia.pdf>. Diakses tanggal 19 Oktober 2020.
- Kompas. Target Pajak Tahun 2021 diyakini Tercapai. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/03/01/target-pajak-tahun2021-diyakini-tercapai/?_t=. Diakses 31 Maret 2021.
- Seputar Ilmu. Efisiensi: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contoh Terlengkap. <https://seputarilmu.com/2019/12/efisiensi.html>. Diakses pada 23 Februari 2021.
- Seputar Pengetahuan. Pengawasan: Pengertian, Tujuan, Fungsi dan Jenisnya. <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/05/pengertian-pengawasan-tujuan-fungsi-jenis-jenis.html>. Diakses pada 5 Mei 2021.